

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, IPM, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PULAU JAWA

Aprilla Gagah Dwi Rahman, Nurul Hanifa

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: aprillagagah.19046@mhs.unesa.ac.id, nurulhanifa@unesa.ac.id

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan guna menyelidiki pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dalam Pulau Jawa. Data ini didapatkan dari publikasi BPS periode 2012-2021. Penelitian ini memakai analisa regresi data panel serta memberikan hasil jika dengan cara parsial Pengeluaran Pemerintah (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan (Y). Indeks Pembangunan Manusia (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (Y). Pengangguran (X3) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Sedangkan secara bersama-sama, pengeluaran pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, serta pengangguran memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Kata Kunci : Kemiskinan; Pengeluaran Pemerintah; Indeks Pembangunan Manusia; Pengangguran.

Abstract

This study aims to investigate the effect of government spending, human development index, and unemployment on poverty in Java. This data was obtained from BPS publications for the 2012-2021 period. This study uses panel data regression analysis and provides results if partially Government Expenditure (X1) has a significant positive effect on poverty (Y). The Human Development Index (X2) has a significant negative effect on poverty (Y). Unemployment (X3) has no effect on poverty (Y). Meanwhile, together, government spending, the Human Development Index, and unemployment have an influence on poverty in Java.

Keywords: Poverty; Government Expenditure; The Human Development Index; Unemployment.

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang dihadapi dan perlu diselesaikan bagi negara maju ataupun negara berkembang. Bahkan pada negara-negara yang sudah maju memberi anggapan bahwa kemiskinan sebagai permasalahan yang perlu diselesaikan. Terutama untuk negara-negara berkembang dengan populasi masyarakatnya yang besar, tidak mengherankan jika mereka menghadapi persoalan kemiskinan. Kemiskinan dalam negara-negara berkembang, satu diantaranya yakni Indonesia, merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang melibatkan banyak aspek yang saling terkait, tak sekedar terbatas dalam aspek perekonomian, tetapi juga melibatkan aspek-aspek diluar perekonomian. (Azmi & Panjawa, 2022).

Di Indonesia, kemiskinan ialah suatu permasalahan yang amat serius, bukan hanya dikarenakan tingkatnya yang makin mengalami peningkatan, tetapi juga karena efeknya yang tak melibatkan aspek perekonomian saja, tetapi juga sosial serta stabilitas politik didalam negeri (Supratyoningasih & Yuliarmi, 2022). Kemiskinan adalah keadaan dimana individu ataupun suatu golongan tak mempunyai kemampuan ekonomi guna memenuhi standar hidup yang umumnya berlaku dalam suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini tercermin dari pemasukan yang rendah guna mencukupi kebutuhan dasar semacam makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Pemasukan yang rendah pun memiliki dampak pada penurunan potensi guna mencapai standar hidup rerata, semacam standar kesehatan serta pendidikan masyarakat (Hildegunda, 2010).

Pemerintah, dalam hal ini di tingkat pusat / daerah, melaksanakan program pembangunan ekonomi sebagai upaya menciptakan perubahan yang signifikan terutama dalam sektor ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri ialah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat agar dapat mengalami perbaikan yang lebih baik dimasa mendatang. Guna mewujudkan tujuan yang diharapkan dalam proses pembangunan ekonomi, maka diperlukan dukungan dari beberapa faktor agar tahapan itu mampu berjalan dengan cara yang efektif serta berkelanjutan.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa

Tahun	Presentase
2012	10.56
2013	10.22
2014	9.81
2015	9.99
2016	9.44
2017	9.24
2018	8.43
2019	8.04
2020	8.88
2021	9.22

Sumber: BPS, Diolah Penulis

Berdasarkan table 1, diketahui presentase kemiskinan di Pulau Jawa bervariasi cenderung menurun. Namun mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Kenaikan yang drastis itu berlangsung dalam tahun 2020 sejumlah 8.88%. Sedangkan di tahun 2021 membuktikan perihail yang serupa yakni berlangsung peningkatan presentase kemiskinan sejumlah 9.22%. Bersumber atas BPS (Badan Pusat Statistik) diperoleh data bahwa Provinsi DI Yogyakarta sebagai Parovinsi dengan Presentase Kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dengan rerata kemiskinan pada tahun 2012-2021 sebesar 13.56%. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan rerata angka kemiskinan terendah pada tahun 2012-2021 sebesar 3.86 %.

Kemiskinan bermuara pada beberapa faktor, berlandaskan atas teori lingkaran kemiskinan yang dijelaskan oleh Nurske pada tahun 1953, menjelaskan bahwa terjadinya keterbelakangan serta ketertinggalan SDM (Sumber Daya Manusia) hal itu dicerminkan berdasarkan rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketidaksempurnaan yang terjadi pasar, serta keterbatasan modal yang dapat mengakibatkan produktivitas rendah, yang pada akhirnya mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran.

Naik turunnya suatu tingkatan kemiskinan salah satunya dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Menurut hasil penelitian (Goni et al., 2022) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mereka dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pengeluaran pemerintah menurut Sukirno mencakup konsumsi barang serta layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan anggaran yang digunakan guna kebutuhan administrasi pemerintahan serta aktivitas pembangunan (Sukirno, 2008). Para ekonom mempunyai gagasan bahwasanya peningkatan pengeluaran pemerintah merupakan cara yang efisien guna mengurangi tingkat kemiskinan

Tidak hanya Pengeluaran Pemerintah, Tingkat kemiskinan sering kali terkait erat dengan rendahnya IPM. Jika IPM rendah, kemungkinan besar pendidikan dan akses kesehatan

masyarakat juga terbatas, sehingga menyebabkan kesempatan kerja yang terbatas dan pemasukan yang rendah. Yang hendak memengaruhi meningkatnya kemiskinan. Perihal itu searah terhadap riset yang dilaksanakan (Mukhtar et al., 2019) yang memberi penjelasan jika variabel IPM dengan cara parsial berpengaruh signifikan pada variabel kemiskinan.

Bersumber atas BPS (Badan Pusat Statistik) menjelaskan bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ialah sebuah indeks gabungan yang dihasilkan dengan cara mengambil nilai rerata sederhana atas 3 indikator yang mencerminkan potensi dasar manusia guna meningkatkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka. Indikator tersebut mencakup Indeks Standar Hidup Layak, Indeks Pendidikan, dan Indeks Harapan Hidup. Berlandaskan atas (Syaifullah & Malik, 2017) IPM digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Pulau Jawa memiliki distribusi pembangunan yang terdistribusi secara merata, hal ini terlihat dari mayoritas lembaga pendidikan baik yang formal ataupun nonformal, adanya rumah sakit yang berfasilitas yang memadai, serta ketersediaan berbagai fasilitas lainnya yang bertujuan guna memastikan tingkat kelayakan hidup khalayak. Sebagai akibatnya, mampu diharapkan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan terhadap wilayah-wilayah yang lain. Tetapi, berlandaskan atas data yang memiliki sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perbedaan nilai IPM antara Provinsi DKI Jakarta yang menjadi Provinsi dengan rerata tertinggi didalam Pulau Jawa sebesar 79.57 pada tahun 2012-2021. Dan Provinsi Jawa Timur yang menjadi Provinsi dengan rerata terendah didalam Pulau Jawa sebesar 69.75 pada tahun 2012-2021.

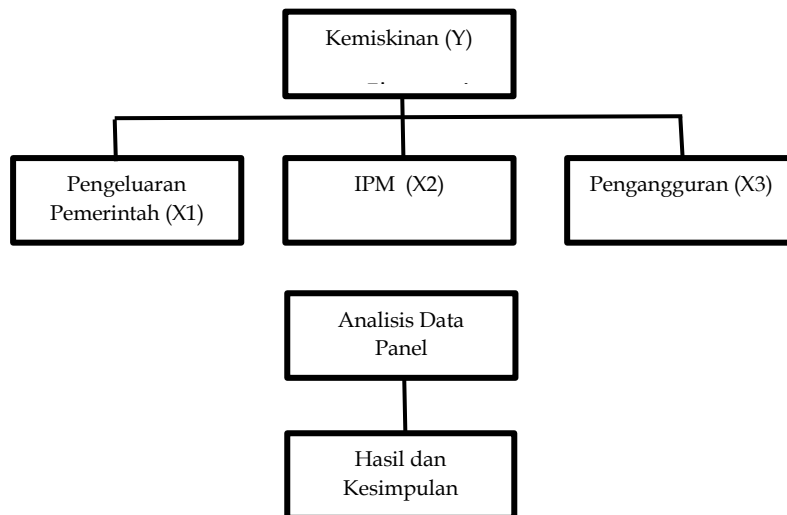
Derajat kemiskinan juga diberi pengaruh melalui sejumlah aspek-aspek lain, salah satunya ialah pengangguran. Menurut penelitian oleh (Adelewokan et al., 2019) Pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan pada derajat kemiskinan. Dengan cara matematis, ada korelasi positif diantara pengangguran dan derajat kemiskinan, dimana peningkatan pengangguran hendak memiliki dampak terhadap peningkatan tingkat kemiskinan. Berlandaskan atas (Sukirno, 2008) pengangguran merupakan kondisi dimana individu yang masuk kedalam angkatan kerja(dalam usia produktif) menginginkan untuk memiliki pekerjaan namun belum berhasil melakukannya. Mereka adalah individu yang tak memiliki pekerjaan akan tetapi berada dalam umur yang produktif.

Salah satu aspek pokok yang mengakibatkan pengangguran ialah rendahnya pengeluaran agregat. Melalui populasi yang besar, seperti yang terjadi dalam Pulau Jawa yang sekitar 142,1 juta jiwa, banyaknya lapangan kerja yang ada tak sesuai terhadap jumlah masyarakat.

Berlandaskan atas beberapa permasalahan diatas, alhasil penulis akan meneliti terkait “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, serta pengangguran terhadap kemiskinan dalam Pulau Jawa.

Metode Penelitian

Metode penelitian memuat jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sasaran/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen, Jenis riset ini merupakan jenis riset kuantitatif. Pada riset ini penulis memakai data sekunder, data tersebut diperoleh melalui unggahan situs resmi BPS Provinsi yang ada dalam Pulau Jawa. Data yang akan dipakai pada riset ini ialah data panel tahun 2012-2021. Sedangkan metode analisa data yang digunakan yakni regresi data panel. Alat bantu yang digunakan dalam pengolahan data yakni software *Eviews 9*. Dengan singkat, rancangan riset ini dapat dilihat dibawah ini:



Sumber: Diolah penulis
Gambar 1. Kerangka Berpikir

Persamaan regresi data panel :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \alpha_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y	: Kemiskinan
X1	: Pengeluaran Pemerintah
X2	: Indeks Pembangunan Manusia
X3	: Pengangguran
I	: Cross section
T	: Time series
β_0	: Intercept
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi
α	: Unobserved factor, memperlihatkan nilai perbedaan antar cross section
μ	: Error term

Hipotesis :

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap derajat kemiskinan dalam Pulau Jawa.
2. Diduga IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berpengaruh negatif signifikan terhadap derajat kemiskinan dalam Pulau Jawa.
3. Diduga Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap derajat kemiskinan di Pulau Jawa
4. Diduga pengeluaran pemerintah, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), serta Pengangguran memengaruhi dengan cara simultan terhadap derajat kemiskinan di Pulau Jawa.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Hasil Analisis Regresi Data Panel

Pemilihan model yang terbaik akan dipakai beberapa uji yang dilakukan untuk menentukan mana model paling ideal guna dipilih, diantaranya ialah:

Uji Chow

Uji Chow dipergunakan dalam menentukan pilihan yang paling ideal diantara Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Setelah melakukan pengujian data, ditemukan bahwa nilai probabilitas Cross-section F adalah 0,000. Memiliki arti jika, nilainya lebih kecil dibandingkan alpha (α) sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Jadi model yang terpilih adalah FEM.

Uji Haustman

Uji Haustman digunakan dalam menentukan suatu model yang paling ideal diantara Fixed Effect Model (FEM) dengan model REM (Random Effect Model). Setelah melakukan pengujian data, diperoleh nilai probabilitas Cross Section Random adalah 0,0004. Memiliki arti jika nilai itu lebih kecil dibandingkan alpha (α) sebesar 0,05 ($0,0004 < 0,05$). Sehingga model yang terpilih ialah FEM. Maka dari itu, pelaksanaan Pengujian Lagrange Multiplier tidak diperlukan.

Berdasarkan uji data yang telah dilakukan, memperoleh kesimpulan bahwa model paling baik yakni Model Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 2. Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.45004	6.992082	7.644367	0.0000
X1	0.048227	0.023944	2.014204	0.0493
X2	-0.626927	0.101739	-6.162098	0.0000
X3	0.107139	0.121244	0.883665	0.3810

Sumber. Diolah oleh penulis

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas yaitu uji yang di pergunakan guna mencari tahu terdapatkah suatu korelasi yang pasti antar variabel bebas melalui model regresi tersebut. Berdasarkan hasil olah data dapat diperoleh hasil yaitu tak terdapat gejala multikol. dikarenakan hasil korelasi antar variabel independen < 0.8 .

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas mengindikasikan adanya masalah dalam suatu model yang menyebabkan estimasi OLS (Ordinary Least Squares) tidak bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Berdasarkan hasil olah data dapat diperoleh hasil yakni grafik residual menunjukkan jika tidak melewati batas (500,-500) yang memiliki artian varian residual sama sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial

Pengujian ini dipergunakan agar menemukan berapa besar dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berlandaskan atas hasil pengujian yang dilaksanakan didapatkan hasil jika Variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) dengan prob 0.0493 dan nilai koefisien 0.048227, memiliki artian bahwa nilai probabilitas lebih kecil daripada 0.05 atau 5%. Yang mana berarti variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y). Variabel IPM (X2) yang memiliki prob 0.0000 serta nilai koefisien -0.626927, yang memiliki artian nilai prob lebih kecil dibandingkan

0,05 atau 5%. Yang memiliki artian Indeks Pembangunan Manusia (IPM/X2) berpengaruh pada variabel Kemiskinan (Y). Variabel Pengangguran (P) dengan prob 0.3810 serta nilai koefisien 0,107139 yang memiliki artian nilai prob tersebut lebih besar dibandingkan 0.05 atau 5%. Yang mana berarti Tingkat Pengangguran (P) tidak berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan (Y).

2. Uji Simultan

Pengujian ini dipakai guna mengidentifikasi seberapa besar pengaruh keseluruhan variabel bebas secara simultan terhadap suatu variabel terikat. Berlandaskan atas hasil pengujian simultan, ditemukan bahwa nilai Probabilitas (F-Statistic) adalah 0,00000, yang memiliki arti nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05. Perihal tersebut menunjukkan jika dengan cara bersamaan, variabel Pengeluaran Pemerintah (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), serta Tingkat Pengangguran (X3) memengaruhi variabel Kemiskinan (Y).

3. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi ini dipakai dalam mengestimasi seberapa besar variasi variabel independen dapat menginterpretasi pengaruhnya pada variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa nilai Adj R-squared adalah 0,967519. Perihal tersebut menunjukkan dengan cara bersamaan ataupun simultan, variabel independen (Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, serta Tingkat Pengangguran) sanggup memberi penjelasan 96% variasi atas variabel dependen. 4% sedangkan memiliki sisa yang dapat diberi penjelasan dengan variabel lain yang tidak dimasukkan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Hasil dilaksanakannya riset ini memperlihatkan bahwasanya, pengeluaran pemerintah membawa dampak positif signifikan pada kemiskinan dalam Provinsi Pulau Jawa tahun 2012-2021. Riset ini memiliki hasil serupa terhadap (Prasetyo, 2015) dan (Goni et al., 2022) dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Bersumber dari (worldbank. 2020) Pengeluaran pemerintah memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara salah satunya yaitu Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Ini dapat berupa program bantuan sosial tunai, subsidi makanan, bantuan pendidikan, atau program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pengeluaran pemerintah yang cukup besar dan tepat sasaran dalam program ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan.

Hasil penelitian ini juga tidak terlepas dari pembangunan ekonomi yang lebih terfokuskan kepada Pulau Jawa dibandingkan dengan pembangunan ekonomi pada Pulau lain yang ada di Indonesia. Besarnya anggaran APBN Provinsi-Provinsi yang terdapat dalam Pulau Jawa tentunya berbeda dengan besarnya anggaran dalam Provinsi yang berada pada luar Pulau Jawa. Hal demikian lah yang dapat menjadi penyebab berpengaruhnya pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan yang ada pada Pulau Jawa.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Riset ini memperoleh hasil bahwasanya variabel Indeks Pembangunan Manusia membawa dampak signifikan pada variabel kemiskinan di dalam Pulau Jawa. Hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan (Mukhtar et al., 2019) serta (Olopade et al., 2019) dengan

hasil riset menjelaskan mengenai Indeks Pembangunan manusia yang memengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan.

Penurunan derajat kemiskinan diakibatkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang memperlihatkan bawasanya IPM mampu meningkatkan efisiensi kerja manusia. Hal ini nantinya berdampak pada peningkatan pendapatan guna terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak. Tingkat kemiskinan sering kali terkait erat dengan rendahnya IPM. Jika IPM rendah, kemungkinan besar pendidikan dan akses kesehatan masyarakat juga terbatas, sehingga menyebabkan kesempatan kerja yang terbatas dan pendapatan yang rendah.

Pembangunan kualitas SDM ialah aspek kunci yang menentukan peningkatan tumbuhnya perekonomian, kualitas SDM harus diinvestasikan dalam pendidikan serta kesehatan, peningkatan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan khalayak. Dimana hal ini memiliki tujuan akhir untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam sebuah wilayah.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Penelitian ini menunjukkan mengenai pengangguran tak mempunyai pengaruh terhadap derajat kemiskinan dalam Pulau Jawa. Hasil riset ini pun selaras pada riset sebelumnya oleh (Mukhtar et al., 2019) serta (Ardian et al., 2021) yang juga menemukan jika pengangguran tidak memengaruhi variabel kemiskinan. Hal tersebut konsisten terhadap teori yang diajukan oleh Lincoln Arsyad, yang megemukaakan bahwa anggapan jika tiap orang yang tidak memiliki pekerjaan merupakan orang miskin, dan setiap orang yang sedang bekerja merupakan orang kaya, adalah salah.

Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan, karena indikator TPT lebih cenderung bersifat informal. TPT mencakup mereka yang tengah mempersiapkan usaha, mencari pekerjaan, yang tidak mencari pekerjaan dikarenakan merasa mustahil dalam memperoleh pekerjaan, serta pekerja yang belum memulai bekerja. Melalui indikator tersebut, terlihat bahwasanya Pengangguran Terbuka bukan hanya akibat dari persaingan yang ketat dalam dunia kerja. Sebaliknya, itu adalah pilihan seseorang masing-masing yang memutuskan untuk menjadi pengusaha dibandingkan bekerja, atau seseorang yang memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan dikarenakan merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan dengan sejumlah alasan. Walaupun mereka adalah pengangguran, tidak serta-merta berarti mereka akan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh sejumlah faktor, seperti kecukupan dukungan dari keluarga atau pekerjaan yang tidak berdasarkan keinginan mereka, baik dalam hal pekerjaan itu sendiri maupun upah yang ditawarkan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, IPM, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Ketiga variabel yakni, pengeluaran pemerintah, IPM, dan Pengangguran dengan cara bersamaan atau simultan membawa dampak signifikan pada tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012-2021. Penelitian ini juga memiliki hasil serupa dengann (Wongkar et al, 2023) dan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa ketiga variabel baik pengeluaran pemerintah, IPM, serta Pengangguran dengan cara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta derajat pengangguran membawa pengaruh yang signifikan pada tingkat kemiskinan. Hal itu dapat dijelaskan ketika Pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mereka dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.. Tingkat kemiskinan sering kali terkait erat dengan rendahnya IPM. Jika

IPM rendah, kemungkinan besar pendidikan dan akses kesehatan masyarakat juga terbatas, sehingga menyebabkan kesempatan kerja yang terbatas dan pendapatan yang rendah. Lalu Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi penyebab kemiskinan. Ketika tingkat pengangguran tinggi, kesempatan kerja menjadi langka, dan masyarakat sulit untuk memperoleh pendapatan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, mengurangi tingkat pengangguran melalui kebijakan yang menunjang laju perekonomian dan membuka lapangan kerja dapat membantu meminimalisir tingkat kemiskinan.

Kesimpulan

Pengeluaran pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan memiliki suatu pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di dalam Pulau Jawa. Hasil uji t diketahui bahwa variabel pengangguran tidak memiliki suatu pengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah maupun Indeks Pembangunan Manusia memiliki suatu pengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Pemerintah di setiap Provinsi di Pulau Jawa diharapkan terus memperhatikan dan mengatasi tiga faktor ini secara bersama-sama guna mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan peluang lapangan pekerjaan untuk mengimbangi jumlah penduduk usia angkatan kerja. Masyarakat diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar lebih inovatif, kreatif, dan produktif dalam berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, bagi peneliti lain, diharapkan dapat menambahkan variabel tambahan yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, upah minimum, dan melakukan pembaharuan dalam periode penelitian. Hal ini akan memperluas pemahaman tentang akar permasalahan kemiskinan secara lebih komprehensif.

Secara kesimpulan, upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan peneliti diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Pulau Jawa. Melalui tindakan bersama ini, diharapkan dapat menurunkan suatu tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- Adelowokan, O. A., Maku, O. E., Babasanya, A. O., & Adesoye, A. B. (2019). Unemployment, poverty and economic growth in Nigeria. *Journal of Economics and Management*, 35(1), 5–17. <https://doi.org/10.22367/jem.2019.35.01>
- Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3>
- Azmi, R. M., & Panjawa, J. L. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 127–140. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.277>
- Goni, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 121–132. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42779/37706>
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.

- Ecoplan: Journal of Economics and Development Studies*, 2(2), 77–89.
<https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.20>
- Olopade, B. C., Okodua, H., Oladosun, M., & Asaleye, A. J. (2019). Human capital and poverty reduction in OPEC member-countries. *Heliyon*, 5(8), e02279.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02279>
- Prasetyo, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah: Pendekatan Regresi Data Panel. *Jurnal BPPK*, 8(2), 191–212.
- Sukirno, S. (2008). *Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Supratiyoningsih, L., & Yuliarini, N. N. (2022). Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(01), 1.
<https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p01>
- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI ASEAN-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 107–119.
- Wongkar, Anjela Nadia. Rotinsulu, Tri Oldy. Maramis, M. T. B. (2023). Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 49–60.
- www.worldbank.org. (2020). *Reducing Poverty and Sharing Prosperity in a Changing Indonesia*. Wwww.Worldbank.Org.
<https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/03/01/reducing-poverty-and-sharing-prosperity-in-a-changing-indonesia>